

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1992.
- Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: KencanaPrenada Media Group, 2018.
- Faturrahman Djamil. “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- M. Koniyo Vitra Fitria, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”, jurnal legalitas, Volume 16, Nomor 02, Tahun 2020, Hal 97
- Latief, M. Nur Hasan. “Rekonstruksi Sistem Hukum keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin”, Disertasi: Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, (2015).
- Marsaid. “Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)”, *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2, (2015).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugraha, Firnando Satria. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, (2012).
- QS. *Al-Isra* (17): 70.
- Selawati, Puput Herlina. “Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.2 (2013).
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Syahrani, Riduwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 14 April 2022.

[https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D/](https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20mendefinisikan,orangtua%20angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D/), diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.